



Akuntabilitas Pengelolaan Dana dalam Sistem Bisnis Kolektif Paket G2 di Desa Jayamukti

Ai Fitri Mahmudah¹

Retno Dyah Pekerti²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cipasung Tasikmalaya

Email : aifitrimahmudah12222@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cipasung Tasikmalaya

Email : retnodyahp@uncip.ac.id

Diterima: 9 Juni 2026

Direview: 24 Juni 2026

Dipublikasikan: 2 September 2026

Abstract

In the midst of the rapid development of rural community business ecosystems, the "Paket G2" multilayer collective in Jayamukti Village faces the challenge of maintaining financial accountability and mitigating operational risks within a non-digital framework. This study adopts a qualitative research methodology with an interpretive single case study design to systematically analyze the mechanisms of fund management, accountability practices, and risk mitigation strategies. Data was collected through in-depth interviews with 11 informants, participatory observation, and internal document analysis, processed using NVivo 12 to map agency accountability dynamics. The results demonstrate that Paket G2 operates through a "hybrid system," where transparency is achieved via physical ledger cards and buffer pricing as formal instruments, reinforced by informal control mechanisms based on social capital such as trust and reputation. However, the study identifies a need for SOP formalization to prevent moral hazard. The implications of this study propose an adaptive internal control framework that integrates traditional instruments with social values, offering a governance alternative for rural community business entities without relying solely on digital transformation.

Keywords: Accountability, Agency System, Community Business, Fund Management, Hybrid System.

Abstrak

Di tengah pesatnya perkembangan ekosistem bisnis komunitas pedesaan, kolektif bisnis berlapis "Paket G2" di Desa Jayamukti menghadapi tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan memitigasi risiko operasional di dalam kerangka kerja non-digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal interpretatif untuk menganalisis secara sistematis mekanisme pengelolaan dana, praktik akuntabilitas, serta strategi mitigasi risiko. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 11 informan, observasi partisipatif, serta analisis dokumen internal yang diolah menggunakan NVivo 12 untuk memetakan dinamika akuntabilitas keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paket G2 beroperasi melalui "sistem hibrida," di mana transparansi dicapai melalui penggunaan kartu iuran fisik dan prosedur *buffer pricing* sebagai instrumen formal, yang diperkuat oleh mekanisme kontrol informal berbasis modal sosial seperti amanah dan reputasi. Namun, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan formalisasi SOP untuk mencegah *moral hazard*. Implikasi dari penelitian ini menawarkan model kerangka kerja pengendalian internal adaptif yang memadukan instrumen tradisional dengan nilai-nilai sosial, memberikan alternatif tata kelola bagi entitas bisnis komunitas pedesaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transformasi digital.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Sistem Keagenan, Bisnis Komunitas, Pengelolaan Dana, Sistem Hibrida.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi informal saat ini menjadi tumpuan utama masyarakat dalam mencari alternatif penghasilan di tengah keterbatasan lapangan kerja pada sektor formal (Aganze et al., 2025). Secara nasional menurut data GoodStats (2025), sektor ini mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia, namun dominasi tersebut tidak berbanding lurus dengan kematangan sistem tata kelola keuangannya. Pertumbuhan ini mendorong munculnya berbagai model bisnis kolektif berbasis komunitas yang mengandalkan jaringan perantara sebagai penghimpun dana. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah Paket G2 (atau sering disebut *Si Jitu*) di Desa Jayamukti, Tasikmalaya. Paket G2 merupakan usaha perseorangan yang diinisiasi sejak tahun 2015 dengan model bisnis yang mengintegrasikan layanan tabungan barang dan uang dalam siklus tahunan selama 330 hari.

Dalam sistem ini, terdapat dua alur utama: (1) Tabungan Barang, di mana nilai produk (seperti sembako atau paket anak) dikunci sejak awal melalui *buffer pricing* oleh *Owner* guna melindungi anggota dari fluktuasi harga; serta (2) Tabungan Uang, di mana dana anggota dihimpun untuk dicairkan dalam bentuk tunai. Mekanisme ini bukanlah arisan karena tidak melibatkan pengundian, bukan *pre-order* murni, dan bukan pula sistem *reseller* berjenjang karena insentif bagi hasil bagi 80 *reseller* bersifat *flat* dan akumulatif berdasarkan jumlah anggota yang dikelola langsung. *Owner* bertindak sebagai pusat manajemen dan pengadaan barang, sementara *reseller* berfungsi sebagai unit penghimpun dana di lapangan. Pencairan dilakukan serentak dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Meskipun Paket G2 beroperasi sebagai entitas bisnis komunitas informal tanpa badan hukum, batas operasionalnya ditegaskan melalui tanggung jawab *fiduciary Owner* atas pemenuhan hak anggota. Dalam struktur ini, anggota diposisikan sebagai pihak pemilik dana (*principal*) yang menitipkan amanah melalui *reseller*, untuk kemudian dikonversi menjadi barang sesuai nilai setoran yang diterima *Owner*. Sebagai mitigasi risiko, *Owner* melakukan pengawasan terpusat atas buku daftar anggota guna memastikan seluruh dana yang terhimpun tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan tanggung jawab pengelola atas likuiditas dan pengadaan barang.

Secara teoretis, praktik pengelolaan dana dengan volume transaksi besar seharusnya didukung oleh sistem pengendalian internal yang ketat guna menjamin transparansi serta keamanan dana anggota (Yuanita & Suripto, 2022). Namun, realitas pada banyak entitas komunitas menunjukkan ketergantungan pada instrumen pencatatan manual yang sering kali menjadi titik lemah pemicu inefisiensi pelaporan (Hasanah et al., 2025). Lemahnya pengawasan pada aliran dana ini menciptakan celah yang lebar bagi timbulnya asimetri informasi antara *principal* (anggota sebagai pemilik dana) dan *agent* (pemilik usaha (*owner*) serta jaringan reseller sebagai pihak pengelola). Ketika asimetri informasi ini tidak dimitigasi, risiko *moral hazard* seperti penundaan setoran, pemotongan biaya ganda, hingga penggunaan dana secara oportunistik menjadi ancaman nyata yang dapat mendelegitimasi kepercayaan anggota terhadap entitas bisnis tersebut.

Paket G2 merepresentasikan anomali ekonomi karena mampu menjaga loyalitas ribuan anggota selama 11 tahun meskipun mengandalkan mekanisme pencatatan manual yang rentan. Namun, observasi awal menunjukkan adanya kesenjangan administratif yang signifikan di mana per Maret 2026, dari estimasi awal 3.500 anggota, hanya ditemukan 2.695 entri data aktif. Selisih 805 entri data tersebut bukan merupakan kegagalan akuntabilitas tunggal, melainkan manifestasi risiko operasional sistem manual yang dipicu oleh dinamika partisipasi anggota yang kompleks. Penyebab utamanya adalah perilaku anggota yang melakukan pembatalan parsial (*partial cancellation*) atas paket yang diikuti, misalnya anggota yang semula mendaftar empat jenis paket secara sepihak membatalkan salah satu atau lebih paket tersebut namun tidak ter-update secara sistematis di pembukuan pusat. Selain itu, selisih ini juga dipicu oleh ketidakdisiplinan anggota dalam setoran, penarikan dana di luar jadwal yang tidak terrekonsiliasi, serta adanya *moral hazard* di tingkat perantara yang tidak melaporkan dana masuk secara tepat waktu. Ketidakpastian data ini berdampak langsung pada operasional, yaitu timbulnya penumpukan barang di gudang (*dead stock*) karena *Owner* telah melakukan pengadaan barang berdasarkan pesanan awal, sementara realisasi setoran yang terkumpul tidak mencukupi untuk melunasi seluruh paket yang terdaftar secara administratif. Kesenjangan dalam pengaturan prosedural dan kelembagaan pada jaringan kolaboratif sering kali memicu tensi akuntabilitas yang krusial (Lee, 2021). Dalam konteks struktur *multilayer* Paket G2, tensi ini muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan otonomi *reseller* dengan tuntutan transparansi pemilik usaha. Jika tidak dimitigasi, ketegangan ini berisiko mengancam integritas operasional dan stabilitas jaringan secara keseluruhan.

Fenomena tersebut mengarahkan pada *research gap* dalam literatur akuntansi sektor informal. Meskipun studi terdahulu telah menyoroti pentingnya modal sosial (Lubis et al., 2022) dan peran krusial sistem pengendalian internal dalam mengintegrasikan faktor tata kelola (Harasheh & Provasi, 2022) penelitian saat ini masih sangat terbatas dalam membedah pengendalian internal pada struktur *multi-principal–multi-agent*. Belum banyak literatur yang secara kritis mengkaji bagaimana akuntabilitas dipertahankan dalam sistem dana kolektif berbasis jaringan *reseller* yang masih bergantung pada sistem pencatatan manual, di mana risiko asimetri informasi sangat tinggi (Arifin et al., 2023). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana mekanisme kontrol manual dan modal sosial diorkestrasi menjadi kerangka pengendalian internal yang adaptif. Berangkat dari urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar, yaitu: bagaimana mekanisme pengelolaan dana dan peluang ekonomi dalam sistem bisnis paket kolektif Paket G2 dengan struktur *multilayer*; bagaimana praktik akuntabilitas dijalankan dalam pengelolaan dana yang melibatkan jaringan *reseller*; serta apa saja tantangan yang muncul dalam penerapan akuntabilitas beserta strategi mitigasi risiko dan kerangka kerja pengendalian internal yang tepat untuk diterapkan pada Paket G2 di Desa Jayamukti.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan dalam Struktur *Multilayer*

Penelitian ini menggunakan Teori Keagenan sebagai lensa utama untuk mendiagnosis kompleksitas asimetri informasi pada struktur *nested agency* (agensi bertingkat) di Paket G2. Dalam model ini, hubungan keagenan tidak bersifat dikotomis, melainkan bertingkat: anggota (pelanggan) bertindak sebagai prinsipal utama yang menitipkan dana, sementara *reseller* (agen perantara) dan pemilik usaha/*owner* (agen pusat) menjadi pihak yang memikul tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Pendelegasian wewenang yang berlapis ini menciptakan celah asimetri informasi ganda yang memicu risiko *moral hazard*, seperti penundaan setoran oleh perantara dan tindakan oportunistik lainnya, sejalan dengan perspektif oleh (Jensen & Meckling, 1976) mengenai *agency costs* dalam entitas dengan struktur yang kompleks.

Dalam konteks organisasi hibrida yang memadukan logika profit dan logika komunitas di Desa Jayamukti, rasionalitas ekonomi agen tidak bekerja sendirian. Penelitian ini mengintegrasikan Modal Sosial sebagai mekanisme kontrol informal yang krusial. Nilai kekeluargaan, kepercayaan (*trust*), dan sanksi sosial berfungsi sebagai instrumen mitigasi *agency costs* yang melengkapi formalitas aturan, konsisten dengan temuan Li dan Hua (2023) bahwa modal sosial berfungsi empiris meningkatkan performa keuangan dalam ekosistem informal.

Untuk menjembatani asimetri informasi yang diidentifikasi melalui Teori Keagenan serta pendekatan *Critical Dialogic Accounting*, penelitian ini memposisikan sistem pengendalian internal sebagai kerangka desain solusi. Jika modal sosial adalah mekanisme kontrol informal, maka sistem pengendalian internal yang diusulkan merupakan bentuk formalisasi dari akuntabilitas tersebut. Dengan mengintegrasikan keempat perspektif ini agensi sebagai lensa diagnosa, organisasi hibrida sebagai konteks entitas, modal sosial sebagai mekanisme kontrol informal, serta pengendalian internal sebagai kerangka desain solusi penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya memitigasi risiko dalam entitas ekonomi informal.

Akuntabilitas dan Pengendalian Internal dalam Ekonomi Informal

Akuntabilitas dalam entitas bisnis berbasis komunitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi dari integritas moral pengelola terhadap sumber daya milik anggota (Gray, Adams, & Owen, 2014). Dalam konteks usaha kolektif seperti Paket G2, akuntabilitas terbagi menjadi dua dimensi utama: akuntabilitas keuangan yang menekankan pada transparansi pelaporan, serta akuntabilitas sosial yang berpijak pada modal sosial, kepercayaan (*trust*), dan nilai kolektivitas anggota (Simba et al., 2023; Lubis et al., 2022). Penelitian ini memposisikan akuntabilitas sebagai instrumen pengikat kepercayaan yang menjaga stabilitas usaha di tengah ketiadaan sistem akuntansi formal yang modern.

Salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan sistem, diperlukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang adaptif. Berbeda dengan korporasi besar, SPI dalam entitas informal seringkali belum terdokumentasi dengan baik, sehingga rentan terhadap risiko kecurangan (*fraud*) (Saputra et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep SPI sebagai "Lensa Analitis" untuk

mengevaluasi bagaimana orkestrasi prosedur non-formal seperti penggunaan stempel otoritas tunggal dan verifikasi berjenjang dapat memitigasi risiko operasional. SPI dalam penelitian ini tidak dipandang sebagai daftar periksa administratif, melainkan sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan setiap transaksi sah dan valid di tengah keterbatasan literasi keuangan anggota.

Model Analitis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Matriks Analisis Operasional di mana akuntabilitas dan SPI digunakan sebagai lensa untuk membaca fenomena Paket G2. Setiap elemen tidak diposisikan sebagai variabel statistik yang dihitung pengaruhnya, melainkan sebagai dimensi analisis untuk memahami:

1. Mekanisme Pengelolaan: Bagaimana dana dihimpun dan peluang ekonomi dikelola dalam struktur *multilayer*.
2. Praktik Akuntabilitas: Bagaimana praktik di tingkat *reseller* dimaknai dalam menjaga legitimasi sistem.
3. Mitigasi Risiko: Bagaimana tantangan administratif diselesaikan melalui *framework* kontrol yang adaptif.

Sintesis ini menunjukkan bahwa keberhasilan Paket G2 tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh orkestrasi antara sistem kontrol fisik (stempel), mekanisme verifikasi data manual, dan kekuatan modal sosial. Sebagai ringkasan alur berpikir dalam membedah fenomena tersebut, berikut adalah model analitis yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Matriks Analisis Operasional Paket G2

Tahapan	Komponen	Fokus & Detail
Input	Fenomena	Bisnis informal dengan struktur <i>multilayer</i> (<i>Owner-Reseller-Customer</i>), dana besar, dan pencatatan manual.
	Masalah	1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana & peluang ekonomi? 2. Bagaimana praktik akuntabilitas di jaringan <i>reseller</i> ? 3. Apa tantangan & strategi mitigasi risikonya?
Proses	Lensa Teoretis	<i>Agency Theory</i> , Asimetri Informasi, <i>Separate Entity Concept</i> , & <i>Internal Control</i> .
Output	Tujuan Hasil	Identifikasi hambatan akuntabilitas & rekomendasi model pengelolaan dana transparan.

Sumber : Diolah Penulis, 2026

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal interpretatif, di mana sistem bisnis kolektif Paket G2 di Desa Jayamukti ditetapkan sebagai *bounded case*. Batasan kasus penelitian ini meliputi: (1) Lokasi: Desa Jayamukti, Kabupaten Tasikmalaya; (2) Periode: Proses observasi awal dilakukan sejak Februari 2026, dengan pengumpulan data utama berlangsung pada Mei 2026 hingga Juni 2026; (3) Aktor: Pemilik usaha/*owner*, jaringan *reseller*, dan anggota aktif; serta (4) Aktivitas: Pengelolaan dana, pengadaan barang, dan mekanisme akuntabilitas manual. Pendekatan interpretatif dipilih untuk memahami makna mendalam di balik praktik pengelolaan keuangan dalam struktur *multilayer* yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif (Creswell, 2018).

Data dikumpulkan melalui informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* terhadap 11 orang (*Owner*, *Reseller*, Anggota, dan Validator Ahli). Wawancara mendalam dilakukan dalam durasi 30–60 menit per sesi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda lokal, direkam menggunakan *digital voice recorder*, dan ditranskripsi secara verbatim dalam rentang waktu maksimal 12 hari setelah wawancara. Selain itu, dilakukan 15 kali observasi partisipatif pada siklus rapat koordinasi dan aktivitas transaksi manual. Dokumen sekunder yang dianalisis meliputi buku besar kas, daftar anggota, serta arsip komunikasi digital (WhatsApp komunitas). Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai titik jenuh (*data saturation*), di mana tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan abduktif (kombinasi induktif-deduktif) untuk membedakan proses pengkodean:

1. *Familiarisasi & Open Coding* (Induktif): Data ditelaah secara mendalam untuk menangkap fenomena baru (seperti "stempel" atau "risiko kecurangan") tanpa dibatasi teori di tahap awal.
2. *Axial Coding & Sintesis* (Deduktif): Data selanjutnya diuji dan dikategorikan berdasarkan indikator penelitian yang berpijak pada teori (seperti *separate entity*, *moral hazard*, dan *trust*). Proses ini dibantu oleh NVivo 12 untuk memetakan sintesis menjadi empat tema utama: (1) mekanisme pengelolaan keuangan; (2) praktik akuntabilitas; (3) aspek modal sosial; serta (4) manajemen risiko operasional.
3. *Penyajian & Verifikasi*: Tema yang terbentuk divisualisasikan melalui *concept map*, *mind mapping*, dan *hierarchy chart* untuk memperjelas hubungan antar-konsep.

Untuk menjamin kualitas penelitian, uji *trustworthiness* dilakukan melalui penerapan teknik triangulasi sumber, *member checking*, dan *audit trail*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan tiga dimensi data, yakni pernyataan informan dalam wawancara, bukti fisik catatan kas atau dokumen internal, serta perilaku yang teramati selama observasi lapangan; secara operasional, peneliti melakukan rekonsiliasi silang dengan mencocokkan klaim setoran *reseller* terhadap realisasi dana di buku besar *Owner*. Selanjutnya, *member checking* dilaksanakan pada awal Juni 2026 melalui diskusi validasi temuan secara langsung dengan seluruh informan kunci meliputi pemilik, para *reseller*, dan anggota untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti telah mencerminkan realitas yang mereka alami serta memberikan ruang klarifikasi atas hasil analisis. Terakhir, seluruh kronologi penelitian, mulai dari transkrip mentah, catatan lapangan, hingga dokumen diskusi validasi, diarsipkan secara sistematis sebagai *audit trail* untuk memastikan transparansi dan kemudahan verifikasi data bagi kebutuhan akademik.

HASIL

Penelitian ini memetakan dinamika akuntabilitas pada 10 informan kunci yang merepresentasikan struktur *multilayer* Paket G2 dan 1 akademisi sebagai validator. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber lintas peran (*Owner*, *Reseller*, Anggota) dengan rekam jejak keanggotaan 1–5 tahun. Profil informan disajikan pada Tabel 2.

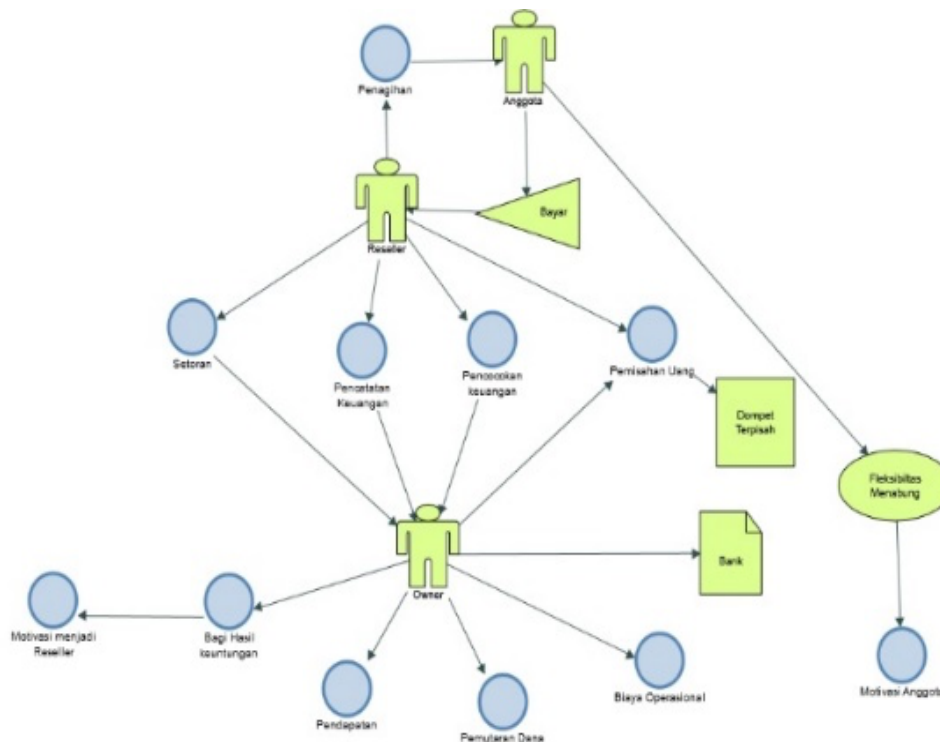
Tabel 2. Profil Informan Penelitian

No	Kode	Peran/Jabatan	Asal Wilayah	Masa Keanggotaan
1	P-01	<i>Owner</i> (Pemilik)	Legok Sirna	-
2	R-01	<i>Reseller</i>	Bojong	3-4 Tahun
3	R-02	<i>Reseller</i>	Cigadog	4-5 Tahun
4	R-03	<i>Reseller</i>	Padakembang	1-2 Tahun
5	R-04	<i>Reseller</i>	Picung	3-4 Tahun
6	R-05	<i>Reseller</i>	Salareuma	3-4 Tahun
7	A-01	Anggota (Konsumen)	Salareuma	3-4 Tahun
8	A-02	Anggota (Konsumen)	Legok Sirna	1-2 Tahun
9	A-03	Anggota (Konsumen)	Nanggorak	1-2 Tahun
10	A-04	Anggota (Konsumen)	Legok Sirna	3-4 Tahun
11	AK-01	Akademisi/Dosen	Tasikmalaya	-

Sumber : Diolah Penulis, 2026

Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Struktur keuangan Paket G2 beroperasi melalui mekanisme *multilayer* yang mengintegrasikan penagihan harian adaptif dengan sistem setoran berkala. Hubungan fungsional antara sistem perputaran uang dan penarikan nilai ekonomi divisualisasikan pada Gambar 2.



Gambar 1. Concept Map Sistem Pengelolaan Keuangan dan Alur Bagi Hasil Paket G2
Sumber : Diolah Penulis, 2026

Sistem keuangan Paket G2 dikendalikan melalui lima pilar integratif: penagihan, setoran, pencatatan, pencocokan, dan pemisahan dana. Berdasarkan triangulasi data pada lima informan kunci yang mewakili pola operasional kolektif, ditemukan adanya konsistensi operasional di mana prosedur yang ditetapkan *owner* diimplementasikan dengan disiplin. Meskipun cakupan informan terbatas, pola ini merepresentasikan mekanisme kontrol yang dipatuhi dalam praktik sehari-hari para *reseller* di lingkungan tersebut.

Siklus perputaran kas dimulai dari aktivitas penagihan yang adaptif. *Reseller* bertindak sebagai *relationship manager informal* yang menyesuaikan pola penarikan kas dengan arus pendapatan anggota. Fleksibilitas ini menjadi kunci loyalitas, seperti diungkapkan oleh salah satu *reseller*:

"Harian sih teh kebanyakan mah da mintanya mau harian, tapi itu ge sih kadang ada yang bayar akumah cenah bulanan aja."

Untuk memitigasi risiko *moral hazard* akibat dana mengendap, *Owner* mewajibkan setoran minimal satu bulan sekali. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya inisiatif mandiri dari *reseller* untuk mempercepat periode setoran sebagai langkah preventif pengamanan aset. Integritas aset diperkuat melalui prosedur segregasi dana yang ketat, di mana *reseller* memisahkan dompet fisik antara uang paket dengan kebutuhan pribadi, sebuah praktik akuntabilitas akar rumput yang krusial bagi keberlangsungan entitas informal.

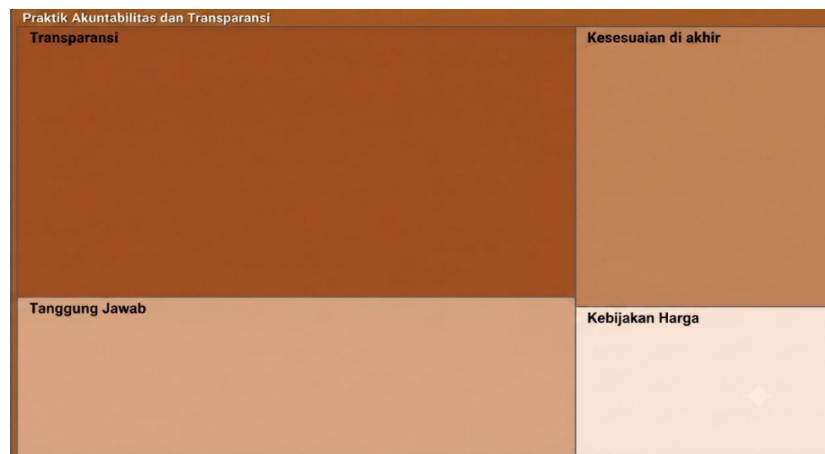
Keberlanjutan ekosistem selama 11 tahun didorong oleh aturan main yang transparan dan skema bagi hasil yang adil. *Owner* menerapkan pembagian keuntungan yang spesifik berdasarkan jenis layanan:

"Kalo paket tabungan, potongannya di bagi dua, kalo dari barang itu 45% reseller, 55% saya."

Kejelasan skema komisi memberikan kepastian nilai ekonomi bagi para agen, yang sekaligus menjadi daya tarik utama. Secara teoretis, disiplin dalam pencatatan keuangan merupakan variabel krusial yang secara signifikan meningkatkan performa usaha mikro (Purwanto et al., 2022). Keberhasilan Paket G2 selama 11 tahun menunjukkan bahwa entitas mikro mampu mencapai performa tinggi ketika didukung oleh ekosistem lokal yang adaptif, sebagaimana temuan Amato dan Candio (2024) yang menegaskan bahwa performa usaha mikro sangat dipengaruhi oleh kemampuan entitas dalam menyelaraskan operasional dengan lingkungan tempat mereka beroperasi.

Praktik Akuntabilitas dan Transparansi

Praktik akuntabilitas pada Paket G2 terpetakan dalam hierarki tematik yang diolah dari hasil coding data NVivo 12 yang disajikan pada Gambar 3 berikut :



Gambar 2. Hierarchy Chart Praktik Akuntabilitas di Paket G2

Sumber : Diolah Penulis, 2026

Transparansi menjadi strategi utama mitigasi konflik. Transparansi visual melalui penggunaan kartu iuran fisik dan bukti foto setoran menjadi instrumen akuntabilitas objektif. Selain itu, kebijakan *buffer pricing* (harga batas aman) menjadi temuan kunci yang menunjukkan kemampuan pengelola dalam memitigasi risiko inflasi tanpa mereduksi nilai ekonomi paket bagi anggota.

Dalam ekosistem bisnis informal, transparansi menjadi strategi utama untuk memitigasi konflik dan mempertahankan reputasi organisasi. Para *reseller* membangun akuntabilitas melalui tindakan verifikasi visual harian guna mengeliminasi ketidakpastian bagi anggota. *Reseller* Cigadog menjelaskan bagaimana ia membuka catatan iuran di depan anggota setiap kali penagihan dilakukan untuk menjamin keterbukaan:

"Saat menagih, selalu saya tunjukkan kartu iurannya. Terkadang ada anggota yang bertanya apakah sudah ditulis atau belum, langsung saya minta mereka lihat sendiri agar yakin dan percaya." (R-02).

Konsistensi pernyataan ini telah divalidasi melalui triangulasi dengan testimoni anggota yang menyatakan kepuasan atas keterbukaan tersebut. Upaya ini diperkuat dengan verifikasi digital saat penyeteroran. *Reseller* Padakembang (R-03) secara proaktif mendokumentasikan bukti setoran sebagai bentuk akuntabilitas objektif:

"Setelah melakukan setoran, saya selalu memfoto buku catatan dari pemilik sebagai bukti bahwa dana tersebut sudah masuk dan tercatat dengan nilai yang sesuai."

Interpretasi peneliti terhadap peran teknologi dalam dokumentasi ini telah dikonfirmasi kebenarannya kepada informan terkait saat wawancara mendalam. Di tingkat pusat, *Owner* (P-01) menerapkan mekanisme kontrol detektif untuk memetakan potensi *moral hazard*. Prosedur ini melibatkan verifikasi aktif dengan meminjam kartu fisik *reseller* untuk memastikan sumber kendala:

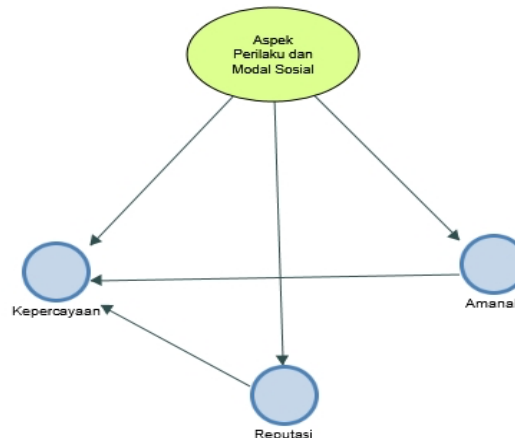
"Saya biasanya meminjam kartu fisik reseller. Jika reseller dengan mudah memberikan kartu tersebut, berarti masalahnya ada di tingkat anggota. Namun jika mereka keberatan, di sanalah saya curiga ada kendala pada pengelolaan dana di tingkat reseller."

Keberlanjutan Paket G2 selama 11 tahun mencerminkan fungsinya sebagai *community anchor*, di mana kelangsungan usaha didorong oleh ikatan sosial dan tata kelola berbasis komunitas, melebihi sekadar orientasi profit (Najera-Ruiz & Juare-Barco, 2026). Ketangguhan ini didukung oleh jejaring sosial organik *reseller* yang mampu menciptakan institusi pertahanan ekonomi alternatif di tengah keterbatasan lembaga formal (Farisani, 2022). Praktik akuntabilitas seperti verifikasi visual dan disiplin pencatatan manual berfungsi sebagai jembatan legitimasi yang memperkuat modal sosial, membuktikan

bahwa bagi entitas pedesaan, sistem akuntansi adalah fondasi ketangguhan ekonomi sekaligus instrumen pemelihara kepercayaan.

Aspek Perilaku dan Modal Sosial sebagai Kendali Informal

Keberhasilan sistem ini bergantung pada aspek perilaku yang berfungsi sebagai "pelumas" bagi sistem manual. Hubungan timbal balik antara Amanah, Reputasi, dan Kepercayaan divisualisasikan pada Gambar 4.



Gambar 3. Concept Map Aspek Perilaku dan Modal Sosial di Paket G2

Sumber : Diolah Penulis, 2026

Kepercayaan dibangun melalui konsistensi; amanah menjadi etika operasional *reseller* dan reputasi (terutama yang melekat pada status publik pengelola) menjadi jaminan kredibilitas implisit. Bagi pengelola, kepercayaan adalah fondasi utama yang diwujudkan melalui komitmen terhadap janji layanan:

"Modal utama dalam paket itu adalah kepercayaan. Bagaimana menjaga kepercayaan customer untuk bisa terus mengikuti paket tersebut? Salah satunya adalah memberikan hasil paket sesuai brosur," (P-01).

Pernyataan pengelola ini telah divalidasi melalui triangulasi dengan testimoni Anggota 4 (A-04) yang mengonfirmasi bahwa perilaku amanah *reseller* di lapangan menjadi alasan utama mereka bertahan dalam sistem:

"Reseller saya nya jujur amanah. Tidak ada masalah, alhamdulillah aman-aman aja," (A-04).

Lebih lanjut, reputasi yang melekat pada status publik pengelola menjadi kendali sosial yang kuat di tingkat lapangan. *Reseller* secara aktif menggunakan profil pengelola sebagai jaminan keamanan bagi calon anggota:

"Saya juga menjelaskan siapa ibu owner ini, terus dia punya usaha apa terus dia suaminya sebagai apa, jadi itu yang membuat para konsumen percaya, oh insyaallah nih ikutan paket kesini tuh insyaallah aman," (R-01).

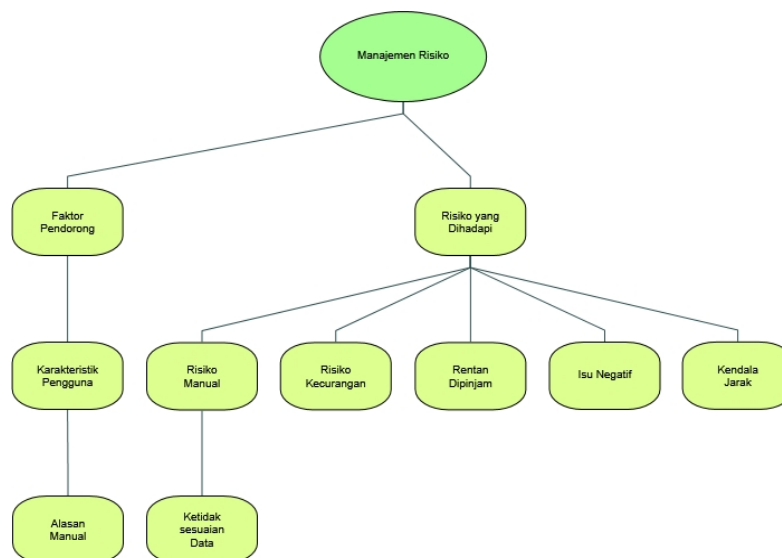
Sanksi sosial berupa hilangnya kepercayaan publik terbukti lebih efektif sebagai mekanisme kontrol daripada sanksi formal. Peneliti telah mengonfirmasi interpretasi mengenai beban moral ini kepada informan (R-03) selama proses wawancara, dan informan membenarkan bahwa sanksi sosial adalah risiko tertinggi yang mereka jaga. Para pelaku sadar bahwa risiko kecurangan bukan hanya kehilangan bisnis, melainkan rusaknya nama baik keluarga:

"Reputasi si bapa teh bukan orang biasa, kalo misalkan ada apa-apa kan ngarembet ka suami nya. Gara-gara hal tidak seberapa, mungkin bisa hancur reputasinya," (R-03).

Praktik ini menegaskan peran modal sosial sebagai *social collateral* yang mendisiplinkan anggota tanpa jaminan fisik. Efektivitas sanksi sosial dalam menjaga kedisiplinan dan keberhasilan pelunasan telah teruji secara empiris (Foster et al., 2026; Li dan Hua, 2023). Namun, ketergantungan pada modal sosial membawa risiko laten; Wang dan Qi (2025) memperingatkan bahwa tekanan kewajiban keuangan dalam skema tanggung renteng berpotensi mengikis kepercayaan tersebut. Dalam konteks Paket G2, risiko ini dimitigasi oleh pengelola melalui peran mediasi yang transparan, membuktikan bahwa keberhasilan kendali informal bergantung pada sinergi antara ketegasan sanksi dan tata kelola hubungan yang suportif.

Manajemen Risiko dan Mitigasi Operasional

Keberlangsungan entitas bisnis informal dalam lanskap ekonomi saat ini menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait kerentanan finansial yang bersifat laten. Zhang et al. (2023) menjelaskan bahwa ketidakmampuan dalam memitigasi perilaku oportunistik dan kecurangan operasional merupakan ancaman serius bagi ketahanan bisnis, terutama dalam ekosistem yang kompleks. Fenomena ini diperkuat oleh Mwemezi et al. (2026) yang menekankan pentingnya kerangka kerja mitigasi risiko yang divalidasi oleh praktisi lapangan untuk mendukung ketangguhan usaha, sejalan dengan temuan Bahamid et al. (2022) bahwa sektor informal sering kali mengandalkan manajemen risiko berbasis data historis dan intuisi subjektif sebagai mekanisme pertahanan operasional. Lebih jauh, Dzawanda & Matsa (2023) menyoroti bahwa praktik-praktik non-standar ini bukanlah bentuk kelalaian, melainkan strategi adaptif dalam ekosistem yang serba terbatas. Dalam konteks Paket G2, ketidakpastian operasional menuntut mekanisme mitigasi yang serupa. Berangkat dari fenomena tersebut, rekonstruksi terhadap pola manajemen risiko di Paket G2 dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif informan mulai dari pemilik hingga *reseller* guna memetakan struktur risiko yang terjadi di lapangan. Transformasi data kualitatif dari narasi informan ke dalam struktur analitis yang terukur dilakukan melalui pendekatan *Mind Mapping* berbasis perangkat lunak NVivo. Hasil pemetaan sistematis mengenai risiko dalam ekosistem ini disajikan dalam Gambar 5 berikut:



Gambar 4. Mind Mapping Manajemen Risiko pada Paket G2

Sumber : Diolah Penulis, 2026

Operasional bisnis informal Paket G2 mengelola ketidakpastian melalui pemetaan risiko yang adaptif. Validitas temuan ini dipastikan melalui triangulasi sumber lintas informan serta konfirmasi interpretasi (*member checking*) selama proses wawancara.

Risiko operasional utama muncul dari ketergantungan pada sistem pencatatan manual. Meskipun sistem ini dipilih karena karakteristik anggota (85-90% ibu rumah tangga), sistem ini menciptakan kerentanan fisik. *Reseller* Bojong (R-01) menyoroti risiko *force majeure*:

"Ngga cukup hanya manual saja, misal ya amit-amit kalo ada kecelakaan, misal rumah terbakar itu buku-buku kalo ilang ya bingung juga."

Hasil triangulasi data menunjukkan konsistensi antara kekhawatiran *reseller* dengan pengakuan *Owner* (P-01) yang mengakui adanya selisih saldo akibat kelalaian pencatatan (*omission error*) selama 11 tahun operasional. Dimensi risiko yang lebih kritis adalah risiko kecurangan (*fraud risk*). Ekspansi jaringan ke wilayah pedesaan menciptakan asimetri informasi. *Owner* (P-01) menerapkan pola deteksi pragmatis untuk memitigasi *cash suppression*:

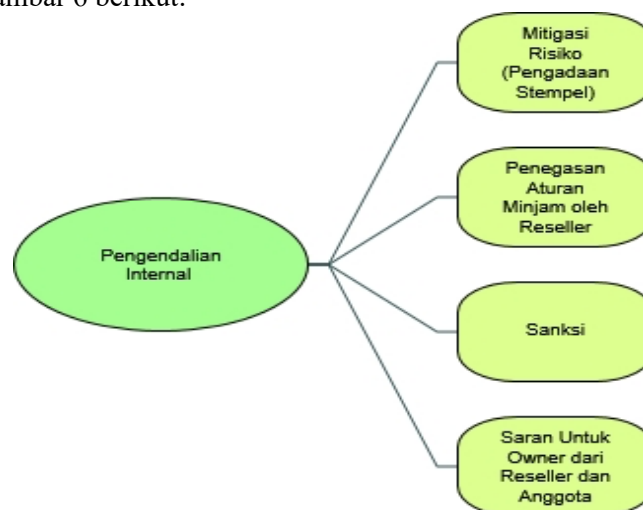
"Saya biasanya mengukur dari saldo setoran *reseller*, kalo misalnya tiap bulannya itu lima juta, terus bulan selanjutnya menjadi satu juta nah itu saya mulai curiga oh mungkin uangnya terpakai."

Temuan ini divalidasi silang melalui pengakuan informan (R-03 dan R-05) yang pernah menemukan ketidakjujuran rekapan pada jaringan *reseller* lain, sehingga memperkuat argumen bahwa verifikasi kartu fisik adalah instrumen mitigasi paling krusial. Selain itu, risiko penyalahgunaan dana (*cash mingling risk*) menjadi tantangan laten akibat budaya "sungkan" di pedesaan. Para *reseller* seringkali meminjamkan kas kelompok kepada tetangga atau kerabat, sebuah praktik yang diakui secara terbuka oleh *Reseller* Picung:

"Kadang ada yang minjem kita kan tau megang uang, sodara, tetangga, yang penting akhir dikembalikan."

Hasil triangulasi antara pengakuan *reseller* dengan perspektif anggota (A-02) menunjukkan adanya kesenjangan persepsi, sementara anggota menaruh kepercayaan penuh, ketiadaan pemisahan fungsi keuangan yang tegas menciptakan risiko gagal bayar yang rentan terjadi.

Terakhir, kendala geografis memaksa *Owner* beralih dari pengawasan fisik ke monitoring berbasis indikator saldo. Meskipun *Owner* (P-01) mengaku supervisi jarak jauh tidak semudah verifikasi fisik, yang menerapkan pola *husnuzan* yang terukur. Sinergi antara pengakuan *Owner* (P-01) mengenai pola deteksi saldo dan testimoni anggota mengenai jarak tempuh penagihan membuktikan bahwa manajemen risiko Paket G2 adalah bentuk adaptasi pragmatis yang menyeimbangkan antara kepercayaan interpersonal dan kontrol detektif. Namun, ketergantungan pada deteksi saldo saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, untuk memitigasi risiko secara lebih preventif dan memperkuat stabilitas sistem, pengelola mengembangkan struktur pengendalian internal yang lebih berlapis. Struktur ini berfungsi sebagai benteng perlindungan untuk mengamankan integritas data dan perilaku keagenan, sebagaimana dipetakan dalam Gambar 6 berikut:



Gambar 5. Mind Mapping Pengendalian Internal Paket G2

Sumber : Diolah Penulis, 2026

Implementasi stempel resmi dengan "kode rahasia" yang dipegang eksklusif oleh *Owner* menjadi instrumen mitigasi preventif utama untuk mencegah praktik *brand hijacking* dan pemalsuan dokumen yang sempat terjadi pada periode sebelumnya:

"Sebetulnya langkah pengadaan stempel adalah upaya meminimalisir kelicikan. Setiap kartu yang keluar harus saya stempel, dan di dalamnya saya memberikan kode huruf kecil yang tidak terlihat kasatmata sebagai penanda." (P-01).

Hasil triangulasi data menunjukkan konsistensi antara langkah pengamanan ini dengan persepsi keamanan yang dirasakan oleh Anggota 4 (A-04):

"Sejauh ini tenang dan aman, apalagi sekarang ditambah stempel, jadi lebih tenang aja."

Selain otorisasi fisik, integritas ekosistem ini sangat bergantung pada sanksi sosial sebagai mekanisme kontrol perilaku. Karena seluruh jaringan *reseller* saling mengenal dalam komunitas pedesaan yang erat, pelanggaran integritas bukan hanya berdampak pada sanksi administratif, melainkan rusaknya reputasi individu di mata masyarakat. Pengelola memanfaatkan *social capital* ini sebagai kendali informal yang lebih efektif daripada audit formal, sebagaimana ditegaskan oleh *Owner*:

"Yang pertama malu pasti, karena semua reseller saling kenal, jadi pada tahu. Itu sanksi sosial saja sebetulnya. Kalau yang sudah-sudah, tahun berikutnya dia mengundurkan diri dengan sendirinya." (P-01).

Efektivitas sanksi sosial di Paket G2 selaras dengan temuan [Junaidi et al. \(2023\)](#) mengenai peran mediasi modal sosial dalam memperkuat perilaku kewirausahaan sekaligus memitigasi *moral hazard*. Penguatan kontrol pada sektor informal menjadi krusial untuk menekan risiko finansial ([Makmur, 2024](#)), serta pelaku ekonomi cenderung membentuk *private governance* guna mengatasi ketidakpastian secara mandiri ([Jiang & Wang, 2022](#)). Sebagaimana ditegaskan [Barra & Papaccio \(2024\)](#), kualitas regulasi internal menjadi penentu utama integritas pasar, keberhasilan tata kelola entitas informal tidak bergantung pada sistem formal yang kaku, melainkan pada kemampuan pengelola mengintegrasikan modal sosial dengan mekanisme kontrol adaptif. Sistem di Paket G2 ini terus disempurnakan melalui *feedback loop* dari anggota dan *reseller* yang memastikan akurasi data serta transparansi, sebagaimana divisualisasikan melalui analisis frekuensi kata (Gambar 7).



Gambar 6. *Word Cloud* Analisis Frekuensi Kata sebagai Mekanisme Saran

Sumber : Diolah Penulis, 2026

Gambar 7 menunjukkan bahwa isu mengenai 'stempel', 'catatan', dan 'kepercayaan' mendominasi diskursus internal. Sinergi antara masukan anggota (A-02) mengenai perlunya sinkronisasi data per konsumen dan keinginan *reseller* (R-01) akan sistem yang lebih akurat menjadi motor penggerak evolusi pengendalian internal Paket G2 agar tetap adaptif, akurat, dan berintegritas.

PEMBAHASAN

Analisis Akuntabilitas Keagenan dan Mitigasi Risiko

Praktik pengelolaan dana pada Paket G2 mencerminkan dinamika hubungan keagenan yang kompleks antara pemilik dan *reseller*. Berdasarkan *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) asimetri informasi memicu risiko *moral hazard*, sehingga akuntabilitas perlu dibangun melalui integrasi kontrol formal dan informal. Secara formal, pemilik telah menerapkan stempel dan rekonsiliasi data, namun

pengendalian internal perlu ditingkatkan dari pengawasan pasif menuju *active monitoring* dan audit berkala. Selain itu, pemisahan dompet fisik antara dana pribadi dan kolektif harus diwajibkan sebagai langkah preventif untuk menciptakan *separation of duties* yang tegas, sehingga integritas data keuangan tetap terjaga dari risiko *unintentional fraud* akibat ketidakdisiplinan administratif.

Di sisi lain, akuntabilitas Paket G2 ditopang secara masif oleh modal sosial seperti nilai amanah yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol informal. Namun, saat menghadapi tekanan ekonomi, modal sosial memiliki limitasi. Merujuk pada prinsip *critical dialogic accounting* (Tanima et al., 2024), penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) tidak boleh diposisikan sebagai instrumen pengawasan *top-down*, melainkan harus melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh aktor komunitas. Langkah ini didukung oleh Harkema et al. (2025) yang menekankan pentingnya derajat formalisasi yang tepat agar tim mandiri tetap efektif, serta Aranda-Usón et al. (2024) yang membuktikan bahwa metodologi akuntansi dapat disederhanakan bagi entitas kecil untuk menciptakan kerangka operasional yang objektif dan terukur.

Langkah ini juga sejalan dengan konsep organisasi hibrida (Spanò et al., 2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berperan krusial dalam menengahi ketegangan antara nilai-nilai komunitas dan profesionalisme operasional. Sebagaimana ditegaskan oleh Eitrem et al. (2024), formalisasi ini bukan sekadar instrumen teknis, melainkan instrumen untuk menegosiasikan kekuasaan dan menyelaraskan logika bisnis dengan nilai sosial. Dengan demikian, SOP yang disusun dapat mengonversi kepercayaan informal menjadi kerangka operasional yang transparan, objektif, serta berkelanjutan bagi seluruh aktor dalam ekosistem Paket G2.

Efektivitas dan Adaptabilitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Paket G2 menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap konteks sosio-kultural Desa Jayamukti. Secara teoretis, praktik pencatatan manual memiliki kerentanan inheren terhadap *human error*. Meskipun mekanisme rekonsiliasi berkala telah diimplementasikan, evaluasi menunjukkan bahwa sistem yang bersifat reaktif masih memiliki kelemahan struktural dalam menjamin integritas data yang komprehensif.

Pembahasan mengenai efektivitas sistem ini bersinggungan dengan urgensi transformasi digital pada entitas mikro. Sejalan dengan temuan Johri et al. (2024), inklusi keuangan digital memang terbukti mampu mengurangi hambatan regulasi dan eksternalitas pasar. Namun, determinan utama keberhasilan transformasi digital bukan terletak pada kecanggihan teknologi semata, melainkan pada kapasitas manajerial dan pengalaman pemilik. Dalam konteks Paket G2, praktik manual yang adaptif berfungsi sebagai "katup pengaman" yang menjaga kedekatan hubungan dengan anggota, namun di saat yang sama menciptakan celah kerapuhan tata kelola.

Integrasi tata kelola dalam sistem pengendalian internal menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Harasheh dan Provasi (2022) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal harus dipandang sebagai instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan aspek tata kelola, di mana sistem yang transparan berfungsi sebagai *first-line assurance* (jaminan lini pertama) bagi pemangku kepentingan. Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan profesionalisme dan pelestarian modal sosial, pendekatan *co-creation* menjadi kunci. Hal ini didukung oleh Coco et al. (2023), yang menekankan bahwa digitalisasi di sektor usaha mikro lebih efektif apabila diposisikan sebagai proses inovasi terbuka yang dipandu secara partisipatif, bukan sekadar adopsi teknologi secara paksa.

Lebih lanjut, formalisasi melalui sistem yang terstruktur memiliki nilai strategis jangka panjang. Li dan Qian (2024) menemukan bahwa pencatatan digital secara signifikan mampu memitigasi kendala pembiayaan (*financing constraints*) dengan mengubah perilaku transaksional menjadi jejak data yang kredibel. Dengan demikian, tantangan bagi Paket G2 bukanlah memaksakan transformasi digital yang radikal, melainkan melakukan formalitas bertahap melalui digitalisasi bukti fisik, standarisasi pencatatan, dan rekonsiliasi partisipatif agar tata kelola menjadi lebih objektif tanpa merusak fondasi kepercayaan (*trust*) yang telah terbangun selama lebih dari satu dekade.

Formalisasi Tata Kelola, Transparansi, dan Implikasi Manajerial

Dalam perspektif tata kelola yang akuntabel, kepercayaan personal perlu diimbangi dengan formalisasi aturan yang objektif agar tidak menjadi celah bagi risiko keagenan. Kejelasan batasan tanggung jawab agen perlu dituangkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis. Upaya formalisasi ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan prasyarat untuk menghindari *cyclical policy trap* atau jebakan stagnasi operasional yang sering menghambat keberlangsungan entitas

informal, sebagaimana diidentifikasi oleh [Owusu-Agyeman dan Aryeh-Adjei, \(2023\)](#). Hal ini sejalan dengan temuan [Waerness et al. \(2023\)](#) yang menegaskan bahwa dalam ekosistem bisnis kecil, kepercayaan (*trust*) memang berperan sebagai mekanisme kontrol utama, namun tetap membutuhkan nilai-nilai kolektif yang terarah agar kontrol formal tidak harus berlebihan namun tetap efektif.

Lebih lanjut, integrasi tata kelola formal ke dalam ekosistem bisnis informal merupakan strategi krusial untuk menjamin keberlanjutan. Temuan [Sultana et al. \(2022\)](#) menegaskan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, entitas bisnis informal perlu mengintegrasikan praktik operasional ke dalam kerangka kerja yang lebih formal agar tidak terjebak dalam kerentanan sistemik. Dalam konteks ini, [Ørtenblad dan Larsen \(2026\)](#) mengingatkan adanya karakter ganda (*double-edged nature*) dari kepercayaan; kepercayaan memang memberikan stabilitas, namun jika tidak diimbangi dengan transparansi, ia dapat menciptakan ketergantungan yang menghambat inovasi. Oleh karena itu, terkait kebijakan *buffer pricing*, langkah tersebut harus dijalankan dengan perhitungan transparan sebagai wujud tanggung jawab kolektif untuk menjaga keberlangsungan hidup komunitas.

Sebagai kontribusi praktis, diusulkan tiga langkah strategis manajerial untuk memperkuat ekosistem Paket G2: (1) Standardisasi operasional berbasis dokumen sebagai pedoman formal; (2) Penerapan *checklist* audit mandiri melalui pelaporan foto saldo fisik mingguan; serta (3) Edukasi transparansi kebijakan harga. Strategi ini merupakan bentuk dari *proactive resilience strategies* sebagaimana ditekankan oleh [Pertheban et al. \(2023\)](#), yang menyatakan bahwa kemampuan ambideksteritas yakni menyeimbangkan antara efisiensi operasional saat ini dan inovasi untuk masa depan adalah penentu utama performa dan resiliensi jangka panjang. Transformasi ini menjadi kunci agar Paket G2 mampu bermigrasi dari sistem yang bergantung sepenuhnya pada kepercayaan personal menuju tata kelola yang lebih *resilient*, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

KESIMPULAN

Struktur keagenan berlapis pada Paket G2 telah berhasil memfasilitasi integrasi ekonomi di tingkat desa, namun sistem ini saat ini menghadapi tantangan kritis akibat ketergantungan yang terlalu tinggi pada modal sosial sebagai pengikat utama hubungan prinsipal-agen, yang memicu kerentanan terhadap asimetri informasi dan risiko *moral hazard*. Praktik akuntabilitas yang dijalankan merupakan sistem hibrida unik yang memadukan kontrol formal dengan modal sosial sebagai strategi adaptasi sosio-kultural, namun sistem ini memiliki kelemahan struktural pada garis akuntabilitas yang kabur akibat perilaku agen yang sering kali menganggap dana anggota sebagai cadangan likuiditas pribadi. Tantangan utama akuntabilitas bersumber dari perilaku agen dan keterbatasan geografis yang menuntut pergeseran paradigma pengawasan dari yang bersifat reaktif dan pasif menuju *active monitoring* yang lebih proaktif. Oleh karena itu, penguatan kerangka kerja pengendalian internal bagi Paket G2 tidak mengharuskan transformasi digital secara drastis, melainkan menuntut formalisasi aturan melalui *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ketat, otorisasi fisik yang transparan, serta budaya edukasi yang berkelanjutan guna menjamin prinsip *going concern* dan menjaga kepercayaan anggota sebagai *stakeholder* utama. Penelitian ini memiliki batasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi temuan. Pertama, temuan bersifat *context-bound*, sehingga dinamika modal sosial di Desa Jayamukti tidak dapat diekstrapolasi langsung ke entitas lain dengan profil sosio-kultural yang berbeda. Kedua, sebagai studi kualitatif, terdapat potensi bias subjektivitas dalam narasi informan (*social desirability bias*) yang meski telah diminimalisir melalui triangulasi dan *member checking*, tetap merefleksikan kebenaran dari perspektif aktor lokal. Menilik batasan tersebut, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* guna menguji performa finansial secara terukur, atau melakukan studi longitudinal untuk menguji daya tahan formalisasi SOP saat terjadi transisi kepemimpinan.

SARAN

Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan pengelola Paket G2 untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat tata kelola usaha, dimulai dengan penyusunan buku panduan SOP ringkas untuk mendokumentasikan batasan tanggung jawab finansial agen guna meminimalisir potensi sengketa. Selain itu, pengelola perlu mengoptimalkan pengawasan melalui penerapan *active monitoring* menggunakan *checklist* audit mandiri dan pelaporan berkala berbasis dokumentasi foto untuk memitigasi kendala geografis, serta melakukan edukasi transparan secara persuasif kepada anggota mengenai justifikasi ekonomi kebijakan *buffer pricing* agar dipahami sebagai strategi stabilitas usaha yang etis.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi pedesaan dengan mengungkap mekanisme kontrol informal dan fondasi akuntabilitas (*existing practice*). Digitalisasi sengaja tidak diintervensi dalam riset ini untuk menghindari *Hawthorne Effect* yang dapat mengaburkan realitas praktik asli dari posisi peneliti sebagai pengamat partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi prasyarat empiris bagi riset mendatang untuk memvalidasi implementasi sistem informasi akuntansi (SIA) berbasis *mobile* dengan antarmuka minimalis (ikonografi/suara). Hal ini bertujuan mendukung keberlangsungan usaha (*going concern*) saat menghadapi transisi skala bisnis, tanpa mencederai tatanan nilai sosio-kultural yang telah terpetakan dalam studi ini.

REFERENSI

- Aganze, R., Mersland, R., D'Espallier, B., & Andersson, K. (2025). Determinants of Sustainability of Informal Community-Based Financial Groups: Insights from a Survival Analysis Approach. *Journal of Development Studies*, 61(10), 1660–1682. <https://doi.org/10.1080/00220388.2025.2487014>
- Amato, S., & Candio, P. (2024). Enhancing micro-enterprises performance: The role of the regional environment. *Strategic Change*, 33(6), 445–461. <https://doi.org/10.1002/jsc.2596>
- Aranda-Usón, A., Scarpellini, S., & Moneva, J. M. (2024). Dynamic capabilities for a “circular accounting” and material flows in a circular economy. *Resources, Conservation and Recycling*, 209(March), 107756. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2024.107756>
- Arifin, M. R., Raharja, B. S., Aligarh, F., & Nugroho, A. (2023). A systematic literature review on community financing : Avenues for further research. *Cogent Business & Management*, 10(2), 2211208. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2211208>
- Bahamid, R. A., Doh, S. I., Khoiry, M. A., Kaseem, M. A and Al-Sharafi, M. A. (2022). The Current Risk Management Practices and Knowledge in the Construction Industry. *Buildings*, 12(7), 1016. <https://doi.org/10.3390/buildings12071016>
- Barra, C., & Papaccio, A. (2024). Does Regulatory Quality Reduce Informal Economy? A Theoretical and Empirical Framework. *Social Indicators Research*, 172(2), 543–567. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03319-6>
- Creswell, John W. & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Coco, N., Colapinto, C., Finotto, V. (2023). Fostering digital literacy among small and micro-enterprises: digital transformation as an open and guided innovation process. *R & D Management*, 54(1), 118-136. <https://doi.org/10.1111/radm.12645>
- Dzawanda, B. & Makomberore, M. (2023). Strategies for Survival in an Informal Economy: Illegalities of Zimbabwean Informal Cross Border Traders at Ports of Entries in Southern Africa. *International Journal of Community Well-Being*, 1. <https://doi.org/10.1007/s42413-023-00191-z>
- Eitrem, A., Meidell, A., & Modell, S. (2024). The use of institutional theory in social and environmental accounting research: a critical review. *Accounting and Business Research*, 54(7), 775–810. <https://doi.org/10.1080/00014788.2024.2328934>
- Farisani, T. R. (2022). The impact of social and institutional networks in sustaining South African rural small, medium and micro enterprises during the crisis. *Acta Commercii*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.4102/ac.v22i1.1007>
- Foster, D., Postma, E., Lamba, S., & Mesoudi, A. (2026). Testing Evolutionary Theories of Human Cooperation via Meta-Analysis of Microfinance Repayment. *Evolutionary Human Sciences*, 8, e15. <https://doi.org/10.1017/ehs.2026.10047>
- GoodStats. (2025). *Proporsi Pekerja di Sektor Informal Kembali Naik pada 2025*. 1 Juli 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/proporsi-pekerja-di-sektor-informal-kembali-naik-pada-2025-iVywZ>
- Gray, R., Adams, C. A. and Owen, D. Accountability. (2014). *Accountability , social responsibility and sustainability : accounting for society and the environment*. Pearson Education.
- Harasheh, M., & Provasi, R. (2022). A need for assurance: Do internal control systems integrate environmental, social, and governance factors? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(1), 384–401. <https://doi.org/10.1002/csr.2361>

- Harkema, L., Vriens, D., Vermeerbergen, L., Gerritsen, D., & Vermeulen, P. (2025). Failure or success of self-organizing teams in long-term care organizations: an integrative systematic literature review on the role of the organization structure. *BMC Health Services Research*, 25(1), 801. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12904-5>
- Hasanah, H. Z., Pratiwi, R., Wahid, U., Semarang, H., Keuangan, A., & Accountability, F. (2025). *Analisis Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan*. 20, 180–185. <https://doi.org/10.46975/8hb7wb71>
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. Retrieved from <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315191157-9/theory-firm-managerial-behavior-agency-costs-ownership-structure-michael-jensen-william-meckling>.
- Jiang, A., & Wang, P. (2022). Governance and Informal Economies : Informality, Uncertainty and Street Vending in China. *The British Journal of Criminology*, 62(6), 1431-1453. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab112>
- Johri, A., Asif, M., Tarkar, P., Khan, W., Rahisha, & Wasiq, M. (2024). Digital financial inclusion in micro enterprises: understanding the determinants and impact on ease of doing business from World Bank survey. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02856-2>
- Junaidi, J., Anwar, S. M., & Sahrir, S. (2023). The role of religion and social capital on entrepreneurship self-efficacy and motivation among students in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(3), 2265091. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2265091>
- Lee, S. (2021). When Tensions Become Opportunities: Managing Accountability Demands in Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(4), 641-655. <https://doi.org/10.1093/jopart/muab051>
- Li, D. & Qian, P. (2024). Mitigating effect of digital payments on the micro-enterprises' financing constraints. *Finance Research Letters*, 62, 105209. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105209>
- Li, W., & Hua, X. (2023). The value of family social capital in informal financial markets: Evidence from China. *Pacific Basin Finance Journal*, 77(December 2022), 101922. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101922>
- Lubis, T. A., Firmansyah, F., Sumarni, S., & Ningsih, M. (2022). Arisan for diversifying financing sources for micro enterprises. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 2355–8520. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.17036>
- Makmur, K. L. (2024). Why only scrutinise formal finance? Money laundering and informal remittance regulations in Indonesia. *Journal of Economic Criminology*, 6(June), 100111. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100111>
- Mwemezi, B. R., Kikwasi, G. J. & Phoya, S. (2026). Development and validation of a framework for improving health and safety risk management at informal construction sites in Tanzania. *Journal of Engineering, Design and Technology*, 24(3). <https://doi.org/10.1108/JEDT-06-2023-0268>
- Najera-Ruiz, T., & Juarez-Barco, I. (2026). Beyond the residual view: a typology of micro enterprises based on growth orientation and ownership structure. *Cogent Business and Management*, 13(1), 2646357. <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2646357>
- Ørtenblad, S. B., & Larsen, M. N. (2026). Trust-building processes in agri-food value chains: Perspectives from Thailand. *Geoforum*, 171(February), 104600. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2026.104600>
- Owusu-Agyema, Y. & Adjei, A. A. (2023). The development of green skills for the informal sector of Ghana: towards sustainable futures. *Journal of Vocational Education & Training*, 76(2), 406-429. <https://doi.org/10.1080/13636820.2023.2238270>
- Pertheban, T. R., Thurasamy, R., Marimuthu, A., Venkatachalam, K. R., Annamalah, S., Paraman, P., & Hoo, W. C. (2023). The Impact of Proactive Resilience Strategies on Organizational Performance: Role of Ambidextrous and Dynamic Capabilities of SMEs in Manufacturing Sector. *Sustainability (Switzerland)*, 15(16), 12665. <https://doi.org/10.3390/su151612665>
- Purwanto, A. H. D., Nashar, M., Jumaryadi, Y., Wibowo, W., & Mekaniwati, A. (2022). Improving medium small micro enterprise' (MSME) performance. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 9(5), 37–46. <https://doi.org/10.21833/IJAAS.2022.05.005>

- Saputra, A., Faraknimela, L., Selvina, P., Herpan, N. F., & Ainun, P. (2026). *Evaluasi implementasi COSO Internal Control Pada Siklus Penjualan Dan Penagihan UMKM Pisang Kipas*. 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i1>
- Simba, A., Martins, O., & Braune, E. (2023). Community financing in entrepreneurship : A focus on women entrepreneurs in the developing world. *Journal of Business Research*, 163, 113962. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113962>
- Spanò, R. Grossi, G. & Landi, G. C. (2022). Academic entrepreneurial hybrids: Accounting and accountability in the case of MegaRide. *The British Accounting Review*, 54(5), 101130. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2022.101130>
- Sultana, N., Rahman, M. M., & Khanam, R. (2022). The effect of the informal sector on sustainable development: Evidence from developing countries. *Business Strategy and Development*, 5(4), 437–451. <https://doi.org/10.1002/bsd2.217>
- Tanima, F. A., Brown, J., & Hopper, T. (2024). Doing critical dialogic accounting and accountability research: an analytical framework and case illustration. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 37(1), 1–30. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2020-5046>
- Waerness, K., Solstad, E., & Arne, B. (2023). Trust-based management control in inter-organizational relationships. *Journal of Management Control*, 34(3), 317–346. <https://doi.org/10.1007/s00187-023-00357-y>
- Wang, W. & Qi, H. (2025). Social capital dilemma in joint liability lending. *Economic Modelling*, 145, 107014. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107014>
- Yuanita, E & Suripto, B. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 454–471. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.18674>
- Zhang, D., Frei, R., Senyo, P. K., Bayer, S., Gerding, E., Wills, G., & Beck, A. (2023). Understanding fraudulent returns and mitigation strategies in multichannel retailing. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 70(September 2022), 103145. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103145>